HUKUM
20/1987-1988
C2
KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian

STUDI TENTANG ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PAYAKUMBUH

(21)

OLEH : DARMILIS, SH. MH
FAKULTAS HUKUM

AN
ALAS

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
1987-1988

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang penelitian

Pemerintahan di Daerah di samping melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan biaya dari pemerintah pusat, juga melakukan kegiatan sendiri yang dibiayai dengan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Dalam memenuhi tugas tersebut atau yang disebut juga tugas desentralisasi dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah dengan agar pendapatan asli daerah dengan tugas agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan semaksimal mungkin, hal ini sejalan pula dengan kebutuhan daerah yang semakin lama semakin berkembang pula.

Dengan keluarnya PERDA no.3 tahun 1973 , maka Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan pemungutan pajak daerah, hasil perusahaan daerah, retribusi daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, namun nampaknya belum mampu berbuat secara maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Satuan Administrasi Dibawah Satu Atap , yang disingkat dengan SAMSAT sebagai suatu instansi yang memberikan pelayanan terhadap pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama (B B N) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikaitkan dengan pengeluaran

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang diselengga - rakan secara bersama-sama oleg beberapa instansi yang tergabung dilokasi yang sama atau di bawah satu atap nampaknya merupakan suatu sistim yang utuh dan efek - tif. Di samping itu secara khusus instansi tersebut merupakan suatu sistim yang melibatkan berbagai-bagai komponen seperti peraturan perundangan, organisasi , personil, metoda, peralatan/fasilitas, pebiayaan dan lain-lain. Namun demikian dalam pelaksanaannya meski-pun nampaknya telah baik dan lancar, kiranya perlu di efektifkan lagi untuk mencapai target yang diinginkan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan aturan pe - rundang-undangan yang berlaku. Atas latar belakang as pek-aspek yang demikianlah penulis tertarik melakukan penelitian ini.

b. Tujuan penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan dan mekanisme pelaksana-an pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Payakumbuh. Aspek-aspek mana saja yang sudah mapan dan aspek-as-pek apa saja yang masih perlu dibenahi lebih lanjut secara efektif. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam pekembangan pe-mungutan pajak daerah pada umumnya dan pajak Kendara-raan bermotor pada khususnya. Secara praktis diharap-kan hasil penelitian ini nantinya akan berguna dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah daerah Tingkat I

rena hal tersebut berkaitan langsung dengan karir kepegawaiannya. Hal tersebut membawa pengaruh langsung terhadap pimpinan atau koordinator yang di - tunjuk untuk mengkoordinir semua urusan. Apalagi adanya suatu anggapan bahwa SAMSAT merupakan instansi yang "basah", sehingga teman seinstansi ada keinginan pula untuk bekerja di sana dengan berbagai cara.

V. PROGRAM YANG HARUS DILAKUKAN.

a. Masalah hukum.

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor serang ini di Sumatera Barat adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor SK.973-497-1987 , yang mulai berlaku 1 Januari 1988.
Jika dihubungkan dengan arti dan maksud pasal 23 ayat (2) UUD 1945, jelaslah bahwa pemungutan pajak kendaraan ber - motor di Sumatera Barat yang mulai berlaku 1 Januari 1988, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang mengharuskan dilakukan berdasarkan Undang-undang dan kalau di Daerah haruslah dalam bentuk PERDA.

Meskipun nampaknya Gubernur Kepa-

V. P E N U T U P

Sebagai penutup laporan ini, jika dihubungkan dengan hipotesa penelitian ini, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pelaksanaan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor yang efektif dan efisien akan menjamin tercapainya target secara maksimal"; dapat - lah diterima oleh karena disadari dengan kehadiran SAMSAT di Payakumbuh telah banyak berhasil dalam meningkatkan penghasilan Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Namun ditemui pula masalah-masalah yang masih menghambat jalannya tugas yang dalam penelitian ini diprogramkan sehingga dengan demikian pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor akan menjadi efektif dan efisien.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS